

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang – Undang Nomer 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 20 Bahwa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan daerah, Pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang – undang nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintahan pusat dan daerah menjelaskan bahwa Sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain – lain pendaptan daerah yang sah. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dengan dana yang didapat dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut sehingga diperlukan rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Salah satu sumber keuangan daerah adalah dari pendapatan asli daerah (PAD).

Undang – undang Nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan Pusat dan pemerintahan daerah telah menetapkan bahwa salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU Nomer 28 Tahun 2009). Berdasarkan undang – undang No.34 Tahun 2000 Jenis – jenis Pajak daerah adalah sebagai berikut; pajak daerah kabupaten / kota menurut UU 34/2000 terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir. Sedangkan retribusi adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara

langsung dan nyata kepada pembayaran, siti Resmi(2017:2). Maka, erat kaitanya sebuah daerah akan berkembang berdasarkan PAD yang didapatkan semakin Kecil PAD yang dipapat maka kemandirian daerah tersebut dalam membangun daerahnya akan kecil dan sebaliknya dengan pendapatan asli daerah yang besar dan mampu dikelola dengan baik maka akan memantapkan kemandirian pembangunan didaerah itu sendiri. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintahan daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber – sumber pendaptan asli daerah yang potensial terutama dari pajak dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien, dan ekonomis.

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan provinsi mauoun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintahan daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi. Pembiayaan daerah dahulu berasal dari pemerintahan pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintahan berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Alasan penulis memilih kota malang sebagai objek penelitian dikarenakan malang adalah kota yang mulai menjadi kota metropolis dengan kondisi geografis yang sangat menguntungkan untuk pebisnis masuk. Serta dengan keuntungan demografi sekarang dimana angkatan anak muda lebih banyak

membuat kota malang menjadi tempat yang sangat cocok untuk dijadikan destinasi wisata kuliner, wisata budaya, ataupun wisata alam. Dengan diuntungkannya para pebisnis dikota malang maka secara tidak langsung pemerintahan daerah mendapatkan masukan pajak dan retribusi daerah yang besar pula.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti seberapa efektifnya pajak daerah retribusi daerah mempengaruhi peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah yang signifikan. Dari latar belakang masalah diatas, maka skripsi peneliti memberi judul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa Peningkatan pajak daerah kota Malang Tahun?
2. Seberapa Peningkatan Retribusi kota Malang Tahun?
3. Besar kontribusi yang dapat diberikan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Pajak daerah di tiap Tahun
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Retribusi daerah di tiap tahun
3. Besar Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah Hasil Penelitian didapat maka Pembaca akan memahami pentingnya Pajak dan Retribusi bagi PAD yang akan dipakai untuk Pembangunan ataupun Urusan Rumah tangga Daerah ataupun bisa menjadi kajian atau referensi untuk penelitian selanjutnya